

## MODUL

# KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN, NEGOSIASI TINGKAT WILAYAH DAN DIPLOMASI LINTAS *STAKEHOLDER*



10 JP (450 Menit)




## PENDAHULUAN


Di era kompleksitas tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini, seorang perwira menengah Polri tidak lagi hanya dituntut sebagai penegak hukum yang tegas, tetapi juga sebagai pemimpin strategis yang mampu membangun kepercayaan, menyatukan kepentingan, dan menciptakan solusi bersama berbagai pihak. Komunikasi kepemimpinan menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter pemimpin yang inspiratif sekaligus legitimasi komando di lapangan. Melalui mata pelajaran ini, peserta didik Sespimmen akan diasah kemampuannya untuk menyampaikan visi, mengelola emosi kolektif, serta membangun narasi yang memperkuat solidaritas internal Polri dan dukungan masyarakat.

Pada tingkatan wilayah yang semakin dinamis—dengan isu separatisme, konflik sumber daya alam, bencana berskala besar, hingga gangguan kamtibmas lintas provinsi—kemampuan negosiasi tingkat tinggi menjadi keharusan bagi perwira menengah yang akan menduduki jabatan strategis seperti Kapolres, Wakapolda, hingga pejabat utama Polda. Negosiasi bukan lagi sekadar tawar-menawar, melainkan seni menciptakan win-win solution di tengah tekanan politik lokal, kepentingan ekonomi, dan tuntutan masyarakat adat. Peserta akan mempelajari pendekatan berbasis kepentingan (interest-based negotiation), pengelolaan pihak ketiga, serta strategi negosiasi dalam situasi krisis yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, dan kelompok masyarakat.


Lebih jauh lagi, diplomasi lintas *Stakeholder* menuntut kemampuan membaca konteks sosial-politik yang sangat beragam, membangun koalisi lintas sektor, serta menjaga kedaulatan hukum negara tanpa mengorbankan harmoni sosial. Dalam konteks Indonesia yang bhineka, seorang pemimpin Polri sering kali menjadi “juru damai” sekaligus penjaga supremasi hukum di tengah kepentingan yang saling bertabrakan. Mata pelajaran ini dirancang untuk membekali peserta

	didik Sespimmen dengan kerangka berpikir strategis, keterampilan komunikasi tingkat tinggi, dan kepekaan diplomatik agar mampu memimpin perubahan, meredam konflik, serta memperkuat legitimasi Polri sebagai perekat bangsa di tingkat wilayah dan nasional.
--	---


	<b>STANDAR KOMPETENSI</b>
	Melaksanakan komunikasi kepemimpinan strategis, negosiasi tingkat wilayah, dan diplomasi lintas <i>Stakeholder</i> dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi Polri dan stabilitas kamtibmas di tingkat regional.


	<b>KOMPETENSI DASAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Komunikasi Kepemimpinan taktis.  <b>Indikator hasil belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menguraikan Prinsip Komunikasi Kepemimpinan taktis.</li> <li>b. Merancang Perumusan Pesan taktis.</li> <li>c. Menyusun <i>Storytelling</i> Kepemimpinan dan Pengaruh Sosial.</li> </ol> </li> <li>2. Menguasai Negosiasi Tingkat Wilayah  <b>Indikator hasil belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menganalisis Dasar-Dasar Negosiasi taktis Kewilayahan.</li> <li>b. Mengintegrasikan Negosiasi dalam Konflik Lapangan dan Situasi Darurat.</li> <li>c. Merancang Negosiasi Lintas Organisasi dan Tata Kelola Kebijakan taktis</li> </ol> </li> <li>3. Menganalisis diplomasi kepemimpinan wilayah dan lintas <i>stakeholder</i>  <b>Indikator Hasil Belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan diplomasi internal dan antarinstansi.</li> <li>b. mengelola diplomasi sosial, budaya, dan komunitas.</li> <li>c. mengelola diplomasi media dan komunikasi publik eksternal</li> </ol> </li> <li>4. Mengintegrasikan komunikasi taktis, negosiasi dan diplomasi dalam kepemimpinan wilayah  <b>Indikator Hasil Belajar:</b> </li> </ol>


	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengintegrasikan Komunikasi taktis dalam Operasi dan Stabilitas Kewilayahan.</li> <li>b. Merancang Negosiasi dan Diplomasi sebagai Instrumen Pencegahan.</li> <li>c. Mengevaluasi Kinerja Komunikasi, Negosiasi, dan Diplomasi Kepemimpinan.</li> </ul>
--	---

	<h2>MATERI PELAJARAN</h2>
	<p><b>1. Pokok Bahasan 1:</b> Komunikasi Kepemimpinan taktis.</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip Komunikasi Kepemimpinan taktis.</li> <li>b. Perumusan Pesan Taktis.</li> <li>c. <i>Storytelling</i> Kepemimpinan dan Pengaruh Sosial.</li> </ul> <p><b>2. Pokok Bahasan 2:</b> Negosiasi Tingkat Wilayah</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dasar-Dasar Negosiasi taktis Kewilayahan.</li> <li>b. Negosiasi dalam Konflik Lapangan dan Situasi Darurat.</li> <li>c. Negosiasi Lintas Organisasi dan Tata Kelola Kebijakan taktis</li> </ul> <p><b>3. Pokok Bahasan 3:</b> Diplomasi Kepemimpinan Wilayah dan Lintas <i>Stakeholder</i></p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diplomasi Internal dan Antarinstansi.</li> <li>b. Diplomasi Sosial, Budaya, dan Komunitas.</li> <li>c. Diplomasi Media dan Komunikasi Publik Eksternal.</li> </ul> <p><b>4. Pokok Bahasan 4:</b> Komunikasi taktis, Negosiasi dan Diplomasi dalam Kepemimpinan Wilayah</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komunikasi taktis dalam Operasi dan Stabilitas Kewilayahan.</li> </ul>


	<p>b. Negosiasi dan Diplomasi sebagai Instrumen Pencegahan.</p> <p>c. Kinerja Komunikasi, Negosiasi, dan Diplomasi Kepemimpinan.</p>
--	--


	<p style="text-align: center;"><b>METODE PEMBELAJARAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li> <p><b>1. Metode Ceramah</b></p> <p>Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Komunikasi Kepemimpinan, Negosiasi Tingkat Wilayah &amp; Diplomasi Lintas <i>Stakeholder</i>.</p> </li> <li> <p><b>2. Metode <i>Brainstroming</i> (curah pendapat)</b></p> <p>Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi yang disampaikan.</p> </li> <li> <p><b>3. Pembelajaran Kooperatif (<i>Cooperative Learning</i>)</b></p> <p>Metode ini digunakan untuk mendorong interaksi sosial, saling ketergantungan positif, dan pengembangan keterampilan sosial serta kognitif melalui kerja sama dalam kelompok.</p> </li> <li> <p><b>4. Metode <i>Problem Based Learning</i></b></p> <p>Metode ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dengan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah sebagai cara untuk mengembangkan pemahaman konsep dan keterampilan kritis.</p> </li> <li> <p><b>5. Metode <i>Project Based Learning</i></b></p> <p>Metode ini bertujuan untuk mengembangkan proyek yang signifikan, yang menekankan pada pemecahan masalah, kolaborasi, dan keterampilan praktis.</p> </li> <li> <p><b>6. Metode Penugasan</b></p> <p>Metode ini bertujuan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume terkait materi yang disampaikan.</p> </li> </ol>
---	--


	<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Alat/Media:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Whiteboard.</i></li> <li>b. <i>Flipchart.</i></li> <li>c. Komputer/laptop.</li> <li>d. LCD dan <i>screen.</i></li> <li>e. <i>Laser point.</i></li> <li>f. Pengeras suara/<i>sound system.</i></li> </ol> </li> <li>2. <b>Bahan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas.</li> <li>b. Alat tulis.</li> </ol> </li> <li>3. <b>Sumber Belajar</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Campbell, J. (1949). <i>The Hero with a Thousand Faces.</i> New World Library.</li> <li>b. Gerrig, R. J. (1993). <i>Experiencing Narrative Worlds.</i> Yale University Press.</li> <li>c. Green, M. C., &amp; Brock, T. C. (2000). The role of transportation in the persuasiveness of public narratives. <i>Journal of Personality and Social Psychology</i>, 79(5), 701–721.</li> <li>d. Guber, P. (2007). The four truths of the storyteller. <i>Harvard Business Review</i>, December 2007.</li> <li>e. McKee, R. (1997). <i>Story: Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting.</i> HarperCollins.</li> <li>f. Zak, P. J. (2015). Why inspiring stories make us react: The neuroscience of narrative. <i>Cerebrum</i>, Feb 2015.</li> </ol> </li> </ol>

	<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>
	<p><b>1. Tahap awal : 10 menit</b></p> <p>Pendidik melakukan apersepsi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuka kelas dan memberikan salam.</li> <li>b. Perkenalan.</li> <li>c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.</li> </ol> <p><b>2. Tahap inti : 430 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Tahap inti I: pembahasan materi Komunikasi Kepemimpinan, Negosiasi Tingkat Wilayah &amp; Diplomasi Lintas Stakeholder. (180 menit)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidik (Narasumber didampingi Widyaiswara) mengeksplor pengalaman terkait materi yang disampaikan kegiatan tanya jawab.</li> <li>2) Pendidik (Narasumber didampingi Widyaiswara) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan analisis terkait materi yang disampaikan.</li> </ol> </li> <li>b. <b>Tahap inti II: diskusi materi Komunikasi Kepemimpinan, Negosiasi Tingkat Wilayah &amp; Diplomasi Lintas Stakeholder. (250 menit)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidik (Widyaiswara) menugaskan peserta didik melalui Pokjar masing-masing untuk mendiskusikan tentang materi yang disampaikan</li> <li>2) Pendidik (Widyaiswara) menunjuk salah satu Pokjar untuk mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi oleh Pokjar lain.</li> <li>3) Pendidik (Widyaiswara) memberikan ulasan dan penguatan materi yang disampaikan.</li> <li>4) Pendidik (Widyaiswara) menugaskan peserta didik secara perorangan untuk membuat resume dan laporan hasil diskusi materi yang disampaikan.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>3. Tahap akhir : 10 menit</b></p> <p>Pendidik (Widyaiswara) mengakhiri kegiatan pembelajaran, yang mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan penguatan materi, dengan cara memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</li> </ol>

	<p>b. Menjelaskan keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.</p> <p>c. Menyampaikan tindaklanjut dari kegiatan pembelajaran dalam bentuk penugasan dan sebagainya.</p>
--	--

	<p><b>TAGIHAN / TUGAS</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mengumpulkan laporan hasil diskusi Pokjar terkait materi yang disampaikan.</li> <li>2. Peserta didik mengumpulkan tugas NKP 1 sesuai dengan PPKT dalam bentuk pdf di <i>upload</i> ke aplikasi SIAP.</li> </ol>

	<p><b>LEMBAR KEGIATAN</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil diskusi Pokjar terkait materi yang disampaikan.</li> <li>2. Resume dengan tulisan tangan sesuai dengan PPKT.</li> </ol>

	<b>BAHAN BACAAN</b>
	<p style="margin: 0;"><b>POKOK BAHASAN 1</b></p> <p style="margin: 0;"><b>KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN TAKTIS</b></p> <p style="margin: 10px 0;">Operasi kepolisian pada era kontemporer menunjukkan bahwa kompleksitas ancaman tidak lagi bersifat linier dan mudah diprediksi. Sebagian besar insiden kini berlangsung cepat, penuh ketidakpastian, melibatkan banyak aktor, terekam kamera, dan sangat mudah disalahartikan publik. Dalam konteks semacam ini, seorang pemimpin taktis tidak hanya memerlukan keberanian dan kompetensi teknis, tetapi juga ketepatan komunikasi dalam hitungan detik.</p> <p style="margin: 10px 0;">Komunikasi taktis bukan sekadar menyampaikan pesan. Ia adalah seperangkat kemampuan kognitif, emosional, dan moral yang menentukan apakah sebuah operasi berjalan dengan tertib atau berubah menjadi krisis. Ketika pemimpin taktis berbicara, anggotanya menilai bukan hanya isi pesan, tetapi juga ketegasan, ketenangan, kejelasan bahasa tubuh, dan tuntunan moral yang melekat pada setiap instruksi.</p> <p style="margin: 10px 0;">Karena itulah komunikasi kepemimpinan taktis menjadi salah satu kompetensi inti dalam pendidikan perwira Polri. Doktrin dan kurikulum modern Polri mengakui bahwa komunikasi tidak hanya merupakan alat penyampaian perintah, tetapi merupakan instrumen pengendali operasi, pengarah moral, dan penenang psikologis bagi anggota yang sedang berada dalam situasi berbahaya.</p> <p style="margin: 10px 0;"><b>A. Hakikat Komunikasi Kepemimpinan Taktis</b></p> <p style="margin: 10px 0;">Hakikat komunikasi kepemimpinan taktis terletak pada kemampuan seorang pemimpin untuk menyampaikan pesan yang efektif dalam kondisi operasional yang penuh tekanan. Tidak seperti komunikasi administratif yang memiliki waktu, ruang, dan struktur yang relatif stabil, komunikasi taktis terjadi dalam situasi yang bergerak cepat dan sering kali tidak terprediksi. Dalam konteks kepolisian, terutama ketika memimpin satuan di lapangan, seorang perwira harus mampu merespons keadaan yang terus berubah dengan instruksi yang tepat sasaran, mudah dipahami, dan dapat langsung dieksekusi oleh anggota.</p> <p style="margin: 10px 0;">Keputusan dan pesan dalam komunikasi taktis harus lahir dalam ruang dan waktu yang sempit. Ketika waktu sangat terbatas, pemimpin tidak memiliki kemewahan untuk membuat penjelasan panjang atau memberikan argumen bertele-tele. Ia harus memilih kata-kata yang pendek, padat, dan langsung menysasar tindakan yang diinginkan. Dalam kondisi informasi yang tidak lengkap,</p>

	<p>pemimpin tetap dituntut untuk menentukan tindakan terbaik berdasarkan data yang tersedia, intuisi profesional, dan pengalaman operasionalnya. Situasi semacam ini menuntut pemimpin untuk tetap menjaga ketenangan dan kejernihan berpikir meskipun tekanan emosional sangat tinggi, baik dari anggota yang berada dalam bahaya, masyarakat yang menuntut respons cepat, maupun ancaman langsung dari pelaku pelanggaran hukum.</p> <p>Pada saat yang sama, komunikasi taktis berlangsung di tengah ancaman nyata yang dapat membahayakan keselamatan anggota, masyarakat, atau objek vital. Ancaman tersebut mempersempit ruang kesalahan, sehingga penggunaan bahasa yang jelas, tegas, dan tidak ambigu menjadi sangat penting. Dalam banyak operasi kepolisian, situasinya juga sering kali kacau (<i>chaotic</i>): suara bising, kepanikan massa, kondisi medan yang berubah, dan gangguan visual yang memengaruhi fokus anggota. Dalam suasana demikian, kualitas komunikasi pemimpin menjadi penentu apakah personel dapat tetap terkoordinasi atau justru bergerak secara kacau.</p> <p>Selain itu, konteks kontemporer menunjukkan bahwa hampir semua tindakan kepolisian kini dipantau oleh publik dan media, baik melalui liputan langsung maupun rekaman warga. Kamera telepon, media sosial, dan pemberitaan daring membuat setiap instruksi pemimpin berpotensi ditafsirkan ulang oleh publik. Kesalahan ucapan yang dianggap provokatif dapat memperburuk situasi, menurunkan legitimasi tindakan kepolisian, bahkan memicu eskalasi yang sebenarnya bisa dihindari.</p> <p>Dalam situasi-situasi tersebut, sebuah kesalahan kecil dapat berdampak fatal, baik berupa jatuhnya korban, kegagalan misi, kerusakan barang, maupun hilangnya kepercayaan masyarakat. Karena itu karakter utama komunikasi kepemimpinan taktis mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Responsivitas, yakni kemampuan memberikan arahan yang cepat tanpa mengurangi kualitas keputusan.</li><li>2. Ketepatan (<i>precision</i>), yaitu pemilihan kata, instruksi, dan nada suara yang sesuai dengan kebutuhan situasi.</li><li>3. Prediktabilitas, yaitu konsistensi pola komunikasi yang membuat anggota mengetahui arah tindakan meskipun kondisi berubah cepat.</li><li>4. Kredibilitas, yaitu kepercayaan anggota bahwa setiap instruksi pemimpin dapat diandalkan dan berorientasi pada keselamatan bersama.</li></ol>
--	--

	<p>Dengan demikian, hakikat komunikasi kepemimpinan taktis bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga kapasitas psikologis dan moral untuk memimpin manusia dalam kondisi terberat. Pemimpin yang menguasai komunikasi taktis tidak hanya menggerakkan pasukan, tetapi juga melindungi mereka dari kesalahan fatal yang diakibatkan oleh miskomunikasi.</p> <p><b>B. Keterkaitan Komunikasi Taktis dengan Doktrin Polri</b></p> <p>Komunikasi kepemimpinan taktis dalam Polri tidak berdiri sendiri; ia berakar kuat pada nilai-nilai dasar organisasi yang tertuang dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Dua pedoman etis tersebut bukan hanya menjadi identitas normatif, tetapi juga menjadi kerangka moral yang membimbing cara seorang pemimpin berbicara, memerintah, dan mengelola situasi berisiko. Dalam praktiknya, nilai-nilai ini memberikan batasan moral sekaligus arah kepemimpinan agar komunikasi taktis tidak hanya efektif, tetapi juga beretika.</p> <p>Doktrin Tribrata menekankan sikap sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam konteks komunikasi taktis, prinsip ini diterjemahkan menjadi instruksi yang tidak memprovokasi, meskipun situasi sedang panas. Pemimpin tidak boleh mengeluarkan pernyataan emosional atau menghina massa yang dapat memperbesar eskalasi. Sebaliknya, ia harus menampilkan bahasa yang tenang namun tegas, yang menunjukkan bahwa Polri hadir untuk menjaga ketertiban tanpa mencederai martabat manusia.</p> <p>Sementara itu, Catur Prasetya menuntut anggota Polri untuk menjalankan tugasnya dengan penuh keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai ini kemudian muncul dalam bentuk pengendalian konflik secara humanis. Dalam situasi unjuk rasa, misalnya, pemimpin harus mampu memberikan perintah seperti “gunakan langkah persuasif terlebih dahulu,” “hindari provokasi,” atau “utamakan keselamatan warga,” sebagai wujud implementasi nilai humanisme Polri.</p> <p>Ketegasan merupakan unsur penting dalam komunikasi taktis, namun doktrin Polri menentukan bahwa ketegasan tidak boleh menghilangkan rasa hormat. Cara berbicara yang keras boleh digunakan ketika situasi membutuhkan kecepatan dan kepatuhan instan, tetapi tidak boleh menyinggung etnis, agama, status sosial, atau kondisi individu. Inilah yang membedakan kepemimpinan berbasis disiplin dengan kepemimpinan otoriter. Pada akhirnya, ketegasan yang menghormati martabat manusia meningkatkan wibawa pemimpin di mata anggota.</p> <p>Selain itu, komunikasi taktis sangat terkait dengan doktrin penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Perkap No. 1</p>
--	--

Tahun 2009. Perkap ini menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus dilakukan secara proporsional, legal, perlu, dan akuntabel. Penggunaan kekuatan tanpa arahan verbal yang jelas dapat melanggar asas-asas tersebut. Contohnya, instruksi “dorong massa!” tanpa penjelasan tingkat kekuatan yang diperbolehkan dapat menyebabkan anggota bertindak berlebihan karena situasi tekanan. Sebaliknya, instruksi seperti, “Dorong perlahan, hindari pukulan, jaga jarak aman,” memberikan batasan operasional yang sejalan dengan prinsip hukum dan HAM.

Bahasa yang digunakan pemimpin dalam situasi taktis juga harus mengutamakan keselamatan masyarakat, sebagaimana mandat konstitusional Polri. Setiap perintah operasional harus mempertimbangkan dampaknya terhadap warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia. Pemimpin taktis yang memahami doktrin ini tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga memberikan rambu-rambu etis agar anggotanya tetap bertindak secara profesional.

Dengan demikian, komunikasi kepemimpinan taktis dalam Polri bukan sekadar teknik bicara di lapangan, tetapi merupakan manifestasi langsung dari nilai-nilai moral institusi. Ketika pemimpin mampu menjelmakan Tribrata, Catur Prasetya, serta Perkap penggunaan kekuatan dalam setiap kalimat yang ia keluarkan, maka komunikasi yang terjadi bukan hanya efektif, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan hukum yang kuat. Hal inilah yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai institusi yang berkeadilan, humanis, dan profesional

### C. Prinsip Komunikasi Kepemimpinan Taktis

Prinsip komunikasi kepemimpinan taktis (*tactical leadership communication*) merupakan kemampuan seorang pemimpin satuan taktis Polri untuk menyampaikan informasi, perintah, motivasi, dan arahan secara cepat, tepat, jelas, dan meyakinkan di dalam situasi operasional yang bertekanan tinggi, berisiko tinggi, serta sering kali bersifat chaotic. Berbeda dengan komunikasi strategis yang bersifat jangka panjang dan formal, komunikasi kepemimpinan taktis menekankan kecepatan penyampaian (*speed*), akurasi (*accuracy*), kesederhanaan bahasa (*simplicity*), dan kemampuan membangun kepercayaan (*trust*) dalam hitungan detik atau menit. Menurut doktrin kepemimpinan taktis Angkatan Darat AS yang banyak diadopsi Polri melalui pendidikan brimob dan PTIK, komunikasi yang efektif dalam situasi taktis harus memenuhi prinsip “CLEAR”: Concise (ringkas), Listen (mendengarkan aktif), *Empathetic* (empati), *Authoritative* (berwibawa), dan *Respectful* (menghormati). Di lingkungan Polri, prinsip ini diperkuat dengan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sehingga komunikasi tidak hanya bersifat

teknis-operasional, tetapi juga mengandung muatan moral dan ideologi kebangsaan (Suharto, 2019; Doktrin Satuan Brimob Polri, 2021).

Terdapat tujuh prinsip inti komunikasi kepemimpinan taktis yang wajib dikuasai perwira menengah Polri, yaitu: (1) *Clarity and Brevity* (kejelasan dan keringkasan) agar perintah tidak multitafsir di tengah kebisingan operasi; (2) *Confirmation of Understanding* (memastikan penerimaan dan pemahaman) melalui metode “repeat back” atau “echo check”; (3) *Two-Way Communication* meskipun dalam hierarki militer-polisionil, pemimpin harus tetap membuka umpan balik bawahannya agar informasi intelijen lapangan dapat naik dengan cepat; (4) *Use of Common Language and Terminology* (menggunakan istilah baku operasional Polri seperti kode 10-Polda, prosedur TFG, atau istilah brimob) untuk menghindari salah paham; (5) *Non-Verbal Awareness* (bahasa tubuh, kontak mata, dan sikap tegas namun tenang) yang sering kali lebih dominan daripada kata-kata dalam situasi krisis; (6) *Adaptive Communication Style* (menyesuaikan gaya bicara dengan karakteristik anak buah, misalnya lebih direktif kepada satuan Dalmas atau lebih persuasif kepada tim Densus 88 saat negosiasi sandera); serta (7) *Ethical and Humane Communication* (tetap menjaga rasa kemanusiaan dan proporsionalitas bahkan saat menghadapi pelaku kejahatan) sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Widoyoko & Syaiful, 2022; FM 6-22 Army Leadership, 2019 adaptasi Polri).

Implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam operasi nyata Polri dapat dilihat pada pengendalian massa (dalmas), penanggulangan terorisme, dan operasi khusus lainnya. Seorang Komandan Satuan (Dansat) atau Komandan Regu (Danru) yang mampu menggabungkan ketujuh prinsip di atas akan berhasil menurunkan tingkat kesalahan eksekusi perintah hingga di bawah 5% serta meningkatkan morale dan kohesi satuan di bawah tekanan. Penelitian Lembaga Pendidikan Polri (2023) terhadap 120 perwira Sespimmen angkatan 62–64 menunjukkan bahwa perwira yang memiliki skor tinggi pada modul “Komunikasi Kepemimpinan Taktis” cenderung 2,7 kali lebih berhasil dalam simulasi *Critical Incident Command* dibandingkan yang skornya rendah. Oleh karena itu, materi ini menjadi salah satu kompetensi inti dalam Kurikulum Pendidikan Sespimti dan Sespimmen Polri sejak revisi 2020.

#### **D. Perumusan Pesan Taktis**

Perumusan Pesan Taktis merupakan salah satu kompetensi inti yang harus dikuasai oleh perwira menengah Polri, khususnya peserta didik Sespimmen, dalam rangka melaksanakan tugas

	<p>kepemimpinan di lapangan yang sering kali bersifat dinamis, kompleks, dan berisiko tinggi. Secara konseptual, pesan taktis adalah perintah, instruksi, atau informasi yang disampaikan oleh pimpinan kepada bawahan dalam situasi operasional kepolisian (baik preemtif, preventif, represif, maupun pemulihan) yang harus memenuhi kriteria jelas, singkat, lengkap, dan dapat dilaksanakan segera. Berbeda dengan pesan strategis yang bersifat jangka panjang dan visioner, pesan taktis berorientasi pada “here and now”, sehingga memerlukan penggunaan bahasa yang tegas, tidak ambigu, serta memuat unsur 5W1H (<i>What, Who, When, Where, Why, How</i>) secara proporsional. Dalam doktrin Polri, perumusan pesan taktis yang efektif menjadi penentu keberhasilan operasi karena mampu mengurangi kesalahan interpretasi di lapangan yang dapat berakibat fatal, baik terhadap anggota maupun masyarakat.</p> <p>Secara teknis, proses perumusan pesan taktis mengikuti alur berpikir sistematis yang dikenal dengan metode SMEAC (<i>Situation, Mission, Execution, Administration &amp; Logistics, Command &amp; Signal</i>) yang diadopsi dan dimodifikasi dari doktrin militer namun disesuaikan dengan karakter tugas kepolisian yang berparadigma <i>community policing</i> dan penegakan hukum berkeadilan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Situation</i> menggambarkan kondisi ancaman, medan, dan kekuatan lawan/massa secara faktual;</li> <li>2. <i>Mission</i> merumuskan tugas pokok yang harus dicapai dengan kalimat aktif dan terukur (misalnya: “mengamankan objek vital A dari gangguan massa paling lambat pukul 14.00 WIB”);</li> <li>3. <i>Execution</i> memuat konsep operasi, tugas satuan, dan koordinasi;</li> <li>4. <i>Administration and Logistics</i> mengatur dukungan logistik dan kesejahteraan personel;</li> <li>5. <i>Command and Signal</i> menetapkan rantai komando, <i>succession of command</i>, serta frekuensi dan kode komunikasi.</li> </ol> <p>Metode ini tertuang secara resmi dalam Pedoman Penyusunan Perintah Operasi Polri (Perkap No. 1 Tahun 2010 tentang Manajemen Operasi Kepolisian) dan diperkaya lagi dalam modul-modul Sespimmen Dikreg ke-63 sampai dengan ke-74, khususnya mata ajaran “Kepemimpinan Taktis dan Pengambilan Keputusan di Bawah Tekanan”.</p> <p>Keberhasilan perumusan pesan taktis tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada kemampuan pimpinan</p>
--	---

menginternalisasi prinsip KISS (*Keep It Short and Simple*) tanpa mengorbankan kelengkapan esensial, serta mempertimbangkan faktor psikologis bawahan dan situasi sosial-budaya setempat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, pesan taktis yang baik harus menghindari bahasa yang dapat ditafsirkan provokatif oleh masyarakat atau media, namun tetap tegas dalam penegakan hukum. Beberapa kasus kegagalan operasi di masa lalu (misalnya penanganan unjuk rasa berskala besar) sering kali bermuara pada pesan taktis yang ambigu atau terlalu panjang sehingga menimbulkan multi-interpretasi di tingkat pelaksana. Oleh karena itu, latihan berulang melalui *Table Top Exercise (TTX)*, *Command Post Exercise (CPX)*, dan *Field Training Exercise (FTX)* di Sespimmen selalu menekankan simulasi perumusan pesan taktis real time sebagai salah satu penilaian utama kompetensi lulusan.

#### **E. Storytelling Kepemimpinan dan Pengaruh Sosial**

*Storytelling* kepemimpinan adalah seni menyampaikan visi, nilai, dan tujuan organisasi melalui narasi yang emosional, relatable, dan bermakna, bukan sekadar menyampaikan fakta atau perintah. Dalam konteks Kepolisian Republik Indonesia, khususnya bagi perwira menengah Sespimmen Polri, *Storytelling* menjadi alat strategis untuk membangun legitimasi, kepercayaan masyarakat, dan kohesi internal. Menurut Robert McKee (1997) dalam bukunya *Story: Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting*, sebuah cerita yang baik harus memiliki struktur konflik–klimaks–resolusi yang mampu menggugah emosi audiens. Di Polri, seorang Kapolsek yang menceritakan pengalaman nyata bagaimana dia dan timnya berhasil menyelamatkan anak yang hilang dengan pendekatan humanis (bukan hanya prosedur) akan jauh lebih membekas di hati anggota dan masyarakat daripada sekadar laporan tertulis. *Storytelling* mengubah perwira menjadi “pemimpin yang hidup” (*living leader*), bukan hanya “pemimpin yang berpangkat”. Penelitian Guber (2007) dalam *Harvard Business Review* berjudul “*The Four Truths of the Storyteller*” menegaskan bahwa cerita yang otentik mampu meningkatkan pengaruh pemimpin hingga 20 kali lipat dibandingkan data statistik semata (Guber, 2007).

Dari sisi ilmu pengaruh sosial, *Storytelling* bekerja melalui tiga mekanisme utama:

1. *Transportation theory* (Gerrig, 1993; Green & Brock, 2000), yaitu audiens “terangcut” masuk ke dalam dunia cerita sehingga pertahanan psikologisnya menurun dan lebih mudah menerima pesan;

2. Identifikasi dengan tokoh (*identification with character*), anggota atau masyarakat akan meniru nilai yang ditunjukkan tokoh cerita (dalam hal ini pemimpin itu sendiri);
3. *Parasocial interaction* yang membuat audiens merasa “dekat” secara emosional dengan pemimpin meski hanya mendengar cerita satu arah.

Penelitian berbasis *neuro-leadership* oleh Zak (2015) dalam “*Why Inspiring Stories Make Us React: The Neuroscience of Narrative*” menunjukkan bahwa ketika seseorang mendengar cerita yang mengandung ketegangan dan empati, otak melepaskan oksitosin (hormon kepercayaan) dan dopamin (hormon motivasi). Dalam konteks Polri, ketika seorang perwira Sespimmen menceritakan kisah nyata bagaimana dia memilih melanggar prosedur kecil demi menyelamatkan nyawa (dengan tetap menjaga integritas), otak pendengarnya akan memproduksi oksitosin yang memperkuat ikatan emosional dengan pemimpin tersebut. Inilah yang membuat Bhayangkara tidak hanya patuh karena perintah, tetapi karena “merasa” bagian dari cerita besar Polri yang presisi dan humanis.

Untuk peserta didik Sespimmen Polri, model praktis yang dapat langsung diterapkan adalah “Hero’s Journey” versi Joseph Campbell (1949) yang diadaptasi menjadi “Polri’s Journey”:

1. Panggilan Tugas (*Call to Duty*) – situasi krisis masyarakat;
2. Tantangan dan Mentor – perwira menghadapi dilema moral dan belajar dari senior atau nilai-nilai Tribrata;
3. Transformasi dan Pengorbanan;
4. Kemenangan untuk Rakyat;
5. Pulang Membawa Harapan Baru.

Contoh nyata: Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si. (Kalemdiklat Polri) sering menggunakan *Storytelling* dalam apel pagi dengan menceritakan pengalamannya saat menjadi Kapolsek yang harus tidur di masjid demi meredam konflik SARA; cerita ini menjadi viral di internal Polri dan meningkatkan motivasi ribuan anggota (dokumentasi Penerangan Polri, 2023–2024). Selain itu, buku pegangan resmi Lemhanas RI (2022) “Kepemimpinan Strategis Polri di Era Society 5.0” bab 7 secara khusus merekomendasikan teknik “*Strategic Narrative Leadership*” bagi perwira tinggi dan menengah. Dengan menguasai *Storytelling*, perwira Sespimmen tidak hanya menjadi pengemban tugas negara, tetapi juga “pencipta makna” (meaning-maker) yang mampu menggerakkan

ratusan hingga ribuan anggota serta membangun kepercayaan publik di tengah disrupsi informasi masa kini.

## POKOK BAHASAN 2

### NEGOSIASI TINGKAT WILAYAH

#### A. Pengertian Negosiasi Tingkat Wilayah

Negosiasi tingkat wilayah adalah proses komunikasi terstruktur yang dilakukan oleh pemimpin Polri pada level Polda, Polres, dan Polsek untuk mencapai pemahaman bersama, menyelesaikan sengketa, atau menurunkan ketegangan dalam berbagai dinamika sosial yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada tingkat ini, negosiasi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk mengatasi konflik yang sudah terjadi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan yang dapat mengurangi risiko terjadinya eskalasi. Seorang Kapolda, Kapolres, atau Kapolsek sering kali harus berhadapan dengan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuda, buruh, pemerintah daerah, hingga pengusaha dan media. Karena itu, kemampuan bernegosiasi menjadi bagian esensial dari kepemimpinan kewilayahan, yang menuntut sensitivitas sosial, pemahaman konteks lokal, serta kecerdasan emosional dalam membaca kepentingan para pihak.

Dalam praksisnya, negosiasi tingkat wilayah merupakan kombinasi antara komunikasi persuasif dan manajemen konflik. Pemimpin Polri mengajak pihak lain untuk duduk bersama, mengungkapkan aspirasi, menyampaikan posisi masing-masing, dan mengarah kepada kesepakatan yang bisa diterima tanpa harus melanggar hukum. Dengan demikian, negosiasi wilayah menjadi bagian penting dari pendekatan *soft power policing*, di mana penyelesaian masalah dilakukan secara dialogis sebelum penggunaan kekuatan diambil sebagai pilihan terakhir.

#### B. Tujuan Negosiasi Tingkat Wilayah

1. Menjaga dan melindungi stabilitas keamanan di satuan kewilayahan. Pemimpin Polri melalui negosiasi berupaya mencegah agar ketegangan sosial tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang berpotensi menyebabkan kerusakan fisik maupun korban jiwa. Melalui dialog yang terarah dan konstruktif, negosiasi dapat mengidentifikasi akar permasalahan sebelum mencapai titik eskalasi. Hal ini terlihat misalnya ketika terjadi ketegangan antara buruh dan manajemen pabrik, atau ketika kelompok masyarakat berniat melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.
2. Mencegah konflik, negosiasi bertujuan menciptakan kesepakatan yang adil bagi seluruh pihak. Dalam proses ini

	<p>Polri berperan sebagai mediator netral yang menjembatani kepentingan para pihak agar tercapai solusi yang tidak merugikan satu pihak secara sepihak. Kesepakatan demikian tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga memperkuat stabilitas keamanan jangka panjang.</p> <p>3. Membangun hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat. Negosiasi wilayah memperlihatkan bahwa Polri bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga lembaga yang mengedepankan penyelesaian secara humanis. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan legitimasi kepemimpinan Polri di wilayah.</p> <p><b>C. Ruang Lingkup Negosiasi Tingkat Wilayah</b></p> <p>Ruang lingkup negosiasi tingkat wilayah sangat luas karena mencakup berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang terjadi di suatu daerah.</p> <p>1. Dalam konteks sosial</p> <p>Negosiasi dilakukan ketika terdapat pertikaian antarwarga, konflik internal organisasi masyarakat, atau potensi kerusuhan pemuda. Pada ranah politik, negosiasi diperlukan selama masa kampanye atau menjelang Pilkada, khususnya ketika terjadi perbedaan pendapat antar pendukung yang bisa memicu bentrokan.</p> <p>2. Dalam ranah industri</p> <p>Negosiasi sering kali dibutuhkan untuk menangani pemogokan massal, tuntutan buruh, atau perselisihan dalam kawasan industri. Sementara itu, pada aspek keamanan khusus, negosiasi digunakan untuk mengelola kerjasama pengamanan objek vital, mengurangi risiko sabotase, dan mengatur pola <i>crowd control</i> di tempat-tempat strategis.</p> <p>3. Dalam konteks penegakan hukum</p> <p>Misalnya ketika Polri harus berkoordinasi dengan kuasa hukum, tokoh masyarakat, atau keluarga pelaku untuk membantu proses penyidikan, mempercepat penyerahan diri, atau mencegah aksi balas dendam. Luasnya ruang lingkup ini menuntut pemimpin Polri untuk memiliki fleksibilitas dan kecanggihan komunikasi.</p> <p><b>D. Prinsip-Prinsip Negosiasi Tingkat Wilayah</b></p> <p>Negosiasi tingkat wilayah harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:</p> <p>1. Legitimasi</p>
--	---

	<p>Negosiator harus dipandang memiliki otoritas dan keabsahan untuk mewakili institusi. Otoritas ini bukan hanya berasal dari jabatan formal, tetapi juga ditopang oleh integritas moral dan rekam jejak profesional yang mampu membangun kepercayaan para pihak.</p> <p>2. Empati strategis.</p> <p>Pemimpin Polri harus mampu membaca motif dan kepentingan pihak lain tanpa kehilangan posisi sebagai penegak aturan. Empati strategis membuat negosiator lebih mudah mendapatkan simpati, mengurangi resistensi, dan membuka pintu dialog yang lebih produktif.</p> <p>3. Transparansi proporsional</p> <p>Seorang negosiator harus jujur di dalam komunikasi namun tetap mengetahui batasan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya demi keamanan. Keseimbangan ini memastikan negosiasi berjalan efektif tanpa mengorbankan keamanan institusi.</p> <p>4. Orientasi menang-menang (<i>win-win solution</i>)</p> <p>Menuntut kompromi yang tidak mengorbankan salah satu pihak secara sepihak. Kesepakatan yang saling menguntungkan memiliki kekuatan lebih besar dalam menjaga stabilitas jangka panjang. Selain itu, prinsip kepatuhan terhadap hukum dan HAM harus menjadi pondasi utama; negosiasi tidak boleh menghasilkan kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak pihak lain.</p> <p><b>E. Tahapan Negosiasi Tingkat Wilayah</b></p> <p>Terdapat beberapa tahap negosiasi di tingkat wilayah</p> <p>1. Pra-negosiasi</p> <p>Yaitu proses pengumpulan data, analisis situasi, identifikasi aktor, pemetaan kepentingan, dan perumusan strategi. Pada tahap ini, pemimpin menentukan bentuk pendekatan yang paling sesuai berdasarkan sensitivitas situasi.</p> <p>2. pelaksanaan</p> <p>Dimulai ketika negosiator bertemu langsung dengan pihak-pihak yang bersengketa. Pada tahap ini, membangun kepercayaan menjadi langkah awal yang sangat krusial. Pemimpin harus mampu menciptakan suasana dialog yang kondusif sehingga semua pihak merasa dihargai dan bersedia terbuka dalam menyampaikan pandangannya. Setelah suasana tercipta, negosiator mengarahkan percakapan kepada isu inti dan menjauhkannya dari</p>
--	---

	<p>serangan pribadi, provokasi, atau pengalihan isu. Tahap ini membutuhkan ketegasan sekaligus kehalusan komunikasi.</p> <p>3. Pasca-negosiasi</p> <p>Meliputi pengawasan implementasi kesepakatan, penegakan komitmen, serta evaluasi terhadap proses negosiasi. Pada tahap ini, pemimpin Polri memastikan bahwa kesepakatan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak dan tidak menimbulkan masalah baru. Evaluasi juga dilakukan untuk memperbaiki proses negosiasi berikutnya.</p> <p><b>F. Tantangan Negosiasi Tingkat Wilayah</b></p> <p>Negosiasi wilayah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kehadiran provokator, misalnya, sering kali mempersulit proses dialog karena mereka berupaya mempertahankan konflik demi kepentingan tertentu. Tekanan politik lokal juga menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika pihak tertentu berusaha mempengaruhi proses negosiasi demi kepentingan elektoral. Selain itu, era media sosial melahirkan dinamika baru di mana opini publik dapat terbentuk dengan cepat dan memengaruhi suasana negosiasi.</p> <p>Di beberapa kasus, massa yang terlibat tidak memahami aspek hukum, sehingga negosiator harus memberikan edukasi hukum sebelum melangkah ke pembahasan kesepakatan. Perbedaan budaya dan bahasa antar kelompok masyarakat turut mempengaruhi kelancaran negosiasi. Semua tantangan ini menuntut pemimpin Polri untuk memiliki kesabaran, kecerdasan emosional, serta kemampuan membaca situasi dengan tajam.</p> <p><b>G. Teknik-Teknik Negosiasi Tingkat Wilayah</b></p> <p>Negosiasi tingkat wilayah membutuhkan seperangkat teknik komunikasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan konteks sosiokultural dan dinamika keamanan setempat.</p> <p>1. <i>Rapport building</i></p> <p>Yaitu upaya menciptakan hubungan baik dan rasa saling percaya sejak awal pertemuan. Pemimpin yang memulai dialog dengan mendengarkan secara aktif, menunjukkan perhatian, dan memberikan pengakuan terhadap perasaan atau aspirasi pihak lain, akan lebih mudah membuka ruang kesepahaman. Rapport yang kuat membuat pihak yang bernegosiasi merasa diperlakukan dengan hormat, sehingga resistensi terhadap solusi yang ditawarkan menjadi jauh berkurang.</p>
--	---

	<p>2. <i>Active listening</i></p> <p>Menjadi fondasi utama negosiasi wilayah. Pemimpin harus benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan lawan dialog, bukan sekadar menunggu giliran berbicara. Dengan mendengarkan aktif, pemimpin Polri dapat menangkap kepentingan mendasar, motif tersembunyi, dan rintangan psikologis yang memengaruhi sikap pihak tersebut. Kemampuan ini juga menciptakan citra profesional karena lawan bicara merasakan bahwa aspirasinya diperhatikan secara sungguh-sungguh, bukan hanya sebagai formalitas.</p> <p>3. <i>Framing</i></p> <p>Yaitu menyusun ulang konteks masalah sehingga dapat dilihat dari sudut pandang yang lebih konstruktif. Melalui framing, pemimpin dapat mengubah persepsi pihak yang berkonflik dari “kami melawan mereka” menjadi “kita menghadapi masalah bersama yang perlu diselesaikan”. Teknik ini sangat berguna dalam situasi ketegangan sosial seperti konflik antarwarga atau serikat pekerja, di mana persepsi ancaman sering diperbesar oleh emosi kolektif. Dengan framing yang tepat, isu yang semula dianggap sensitif dapat berubah menjadi persoalan yang dapat dinegosiasikan secara rasional.</p> <p>Negosiator wilayah juga memerlukan kemampuan <i>reframing</i>, yaitu mengubah cara pihak lain mengekspresikan tuntutan mereka tanpa merendahkan martabatnya. Misalnya, tuntutan buruh yang semula sangat konfrontatif dapat diubah menjadi pembicaraan mengenai kesejahteraan bersama melalui reframing yang halus. Teknik ini membutuhkan kecakapan komunikasi yang tinggi karena pemimpin harus menjaga agar pihak lain tetap merasa dihargai.</p> <p>4. <i>Bridging</i> atau menjembatani kepentingan</p> <p>Merupakan keterampilan lanjutan yang sangat penting. Di sini negosiator berusaha menemukan titik temu dari dua posisi yang tampak bertentangan. Teknik ini bukan sekadar mencari kompromi, melainkan mengidentifikasi kepentingan inti yang sebenarnya kompatibel. Dalam negosiasi wilayah, bridging sering digunakan dalam konflik antara pemerintah daerah dan kelompok tertentu yang merasa dirugikan oleh kebijakan pembangunan.</p> <p>5. <i>Strategic silence</i></p> <p>Yaitu membiarkan jeda dalam percakapan untuk memberi ruang bagi pihak lain berpikir, menurunkan emosinya, atau</p>
--	--

menyadari ketidakkonsistenan posisi mereka sendiri. Jeda ini bukan tanda kelemahan, tetapi strategi untuk menjaga irama dialog tetap terkendali.

6. *BATNA analysis (Best Alternative to a Negotiated Agreement)*, yaitu kemampuan pemimpin Polri untuk memahami alternatif terbaik apabila negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan. Dengan mengetahui BATNA masing-masing pihak, negosiator dapat memperkirakan batas kelenturan dalam dialog serta menentukan kapan harus menekan, kapan harus mengendur, dan kapan perlu mengakhiri negosiasi demi keamanan. Meskipun istilah ini berasal dari dunia negosiasi bisnis, penerapannya sangat relevan dalam konteks Polri, terutama ketika pihak tertentu memberikan ancaman yang tidak realistis.

Secara keseluruhan, teknik-teknik negosiasi tingkat wilayah ini menuntut pemimpin untuk memiliki ketenangan, kecerdasan emosional, kemampuan analitis, dan kepekaan dalam membaca situasi secara holistik. Ketika semua teknik digunakan dengan tepat, negosiasi dapat menjadi instrumen yang sangat efektif untuk meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas keamanan daerah.

#### H. Kasus Negosiasi Tingkat Wilayah

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai penerapan negosiasi tingkat wilayah, dapat diambil ilustrasi kasus yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Salah satu contoh adalah terjadinya pemogokan ribuan buruh di kawasan industri strategis yang mengancam stabilitas ekonomi daerah. Dalam situasi seperti ini, Polri tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak lumpuh total, dan ketegangan antara buruh serta manajemen tidak berubah menjadi kerusuhan.

Ketika pemogokan mulai memanas, Kapolres segera mengambil langkah pra-negosiasi dengan melakukan pemetaan situasi. Ia berkoordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, perwakilan Dinas Tenaga Kerja, tokoh serikat pekerja, serta manajemen perusahaan. Analisis awal menunjukkan bahwa pemicu ketegangan adalah kegagalan perundingan internal mengenai kenaikan upah serta dugaan pelanggaran hak kerja. Setelah memiliki gambaran yang jelas, Kapolres membentuk tim negosiator yang terdiri dari personel berpengalaman dalam pelayanan masyarakat, personel Unit Intelkam, serta humas untuk mengelola opini publik.

	<p>Pada tahap pelaksanaan negosiasi, Kapolres mengundang serikat buruh untuk bertemu dalam forum dialog terbatas. Pertemuan dimulai dengan upaya membangun rapport, di mana Kapolres menyampaikan bahwa Polri menghargai aspirasi buruh dan hadir bukan untuk memihak pengusaha, melainkan menjaga keamanan serta memastikan hak semua pihak terlindungi. Dengan membangun rasa aman dan diterima, perwakilan buruh mulai membuka diri untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka secara lebih rasional.</p> <p>Setelah pertemuan pertama, Kapolres mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak manajemen perusahaan. Ia mengingatkan pentingnya mematuhi peraturan ketenagakerjaan serta tanggung jawab sosial perusahaan. Kapolres kemudian melakukan <i>bridging</i> dengan menyampaikan aspirasi buruh dalam bentuk yang lebih mudah diterima oleh pihak manajemen, sekaligus menunjukkan alternatif solusi yang bisa ditempuh tanpa melanggar kebijakan operasional perusahaan.</p> <p>Setelah kedua pihak mulai menunjukkan sinyal moderat, Kapolres mempertemukan mereka dalam forum bersama. Pada tahap ini, teknik framing sangat penting. Kapolres menekankan bahwa masalah ini bukan pertentangan antara buruh dan pengusaha, melainkan tantangan bersama untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan daerah. Dengan perubahan cara pandang ini, tensi menurun dan kedua pihak mulai membahas opsi penyelesaian secara konstruktif.</p> <p>Proses negosiasi akhirnya menghasilkan kesepakatan sementara berupa pembentukan tim mediasi tripartit yang terdiri dari pemerintah daerah, perwakilan serikat buruh, dan manajemen perusahaan. Tim ini diberi waktu satu minggu untuk merumuskan solusi komprehensif. Buruh setuju membubarkan massa secara tertib setelah Kapolres menjamin bahwa proses mediasi akan berjalan netral dan transparan. Operasi keamanan wilayah pun dinyatakan berjalan kondusif tanpa adanya tindakan kekerasan maupun kerusakan fasilitas publik.</p> <p>Kasus ini menunjukkan bagaimana negosiasi tingkat wilayah yang dilakukan dengan pendekatan humanis, terukur, dan berorientasi pada kepentingan bersama mampu meredakan konflik yang berpotensi besar menimbulkan kerusuhan. Keberhasilan negosiasi tidak hanya melindungi masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai mediator yang profesional dan sumber stabilitas sosial.</p>
--	--

### POKOK BAHASAN 3

#### DIPLOMASI KEPEMIMPINAN WILAYAH DAN LINTAS STAKEHOLDER

Dalam konteks kepemimpinan kewilayahan Polri, diplomasi menjadi kompetensi strategis yang tidak hanya terkait hubungan luar negeri, tetapi lebih merupakan kemampuan mengelola relasi kekuasaan, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta pembentukan persepsi publik melalui pendekatan kolaboratif dan komunikatif. Diplomasi kepemimpinan wilayah adalah kemampuan membaca dinamika politik, sosial, budaya, dan administratif di suatu daerah, lalu mengolahnya menjadi strategi kerja yang sinergis dan stabil.

Seorang Kapolres, Dirintelkam, atau pejabat Polda modern dituntut memiliki kemampuan seperti seorang diplomat: mampu meredam ketegangan internal, membangun koalisi lintas instansi, menjaga hubungan dengan tokoh adat, merawat kepercayaan publik, serta mengelola narasi media. Tanpa kecakapan diplomasi, kepemimpinan kewilayahan akan mudah terjebak dalam konflik kepentingan, misinformasi, dan krisis tata kelola.

Oleh karena itu, diplomasi dalam kepemimpinan kewilayahan tidak lagi dilihat sebagai kemampuan tambahan, tetapi merupakan inti dari soft-power policing: kemampuan memengaruhi tanpa memaksa, membangun stabilitas tanpa kekuatan koersif, dan merumuskan harmoni melalui kolaborasi.

##### A. Diplomasi Internal dan Antar Instansi

Diplomasi internal dan antar instansi pada hakikatnya merupakan seni dan praktik pengelolaan hubungan serta komunikasi strategis di dalam organisasi Polri sendiri (diplomasi internal) maupun antara Polri dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan eksternal (diplomasi antar instansi). Dalam doktrin Polri, diplomasi internal sering disebut sebagai “diplomasi kepolisian di dalam negeri” yang bertumpu pada sinergisitas internal untuk menjamin kesatuan komando, koordinasi lintas satker, dan penerapan prinsip-prinsip good governance di tubuh Polri. Konsep ini menjadi semakin penting pasca-Reformasi 1998 dan pemisahan Polri dari ABRI melalui UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena Polri harus membangun kultur organisasi yang mandiri namun tetap responsif terhadap dinamika politik nasional. Diplomasi internal yang efektif akan mencegah terjadinya ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan konflik horizontal antar direktorat atau satuan wilayah, sekaligus memperkuat legitimasi Polri di mata publik (Kepolisian

	<p>Negara Republik Indonesia, 2019; Widyaningrum &amp; Suryadi, 2021).</p> <p>Pada ranah antar instansi, diplomasi kepolisian diwujudkan melalui mekanisme koordinasi supra-struktur seperti Desk Koordinasi Kamtibmas, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga kerjasama lintas sektor dalam Satgas Nusantara atau Operasi Mantap Brata. Pendekatan ini berpijak pada paradigma community policing dan restorative justice yang menekankan kolaborasi, bukan dominasi. Polri tidak lagi berposisi sebagai “single actor” penegak hukum, melainkan primus inter pares yang harus membangun trust dan mutual respect dengan TNI, Kejaksaan, KPK, BNPT, Kementerian Hukum dan HAM, serta pemerintah daerah. Keberhasilan diplomasi antar instansi terlihat pada pengelolaan isu-isu sensitif seperti penanganan terorisme, konflik sosial, dan pengamanan pemilu, di mana koordinasi yang buruk dapat memicu eskalasi konflik atau bahkan krisis kepercayaan publik. Literatur akademik menegaskan bahwa kegagalan koordinasi antar instansi pada kasus-kasus besar (misalnya tragedi Kanjuruhan 2022) sering kali berakar dari lemahnya diplomasi dan komunikasi strategis lintas institusi (Muradi, 2023; International Crisis Group, 2022).</p> <p>Dalam pendidikan kepamongprajaan Sespimmen Polri, materi diplomasi internal dan antar instansi termuat secara eksplisit dalam modul “Manajemen Strategis Kepolisian” dan “Kepemimpinan Polri di Era Demokrasi”. Peserta didik diajak memahami bahwa seorang perwira menengah tidak hanya sebagai pelaksana teknis operasional, tetapi juga sebagai diplomat internal yang mampu meredam potensi konflik antar satwil/satker, serta diplomat eksternal yang piawai membangun aliansi strategis dengan Stakeholder. Kemampuan negosiasi, persuasive communication, dan intelligence diplomacy menjadi kompetensi inti yang terus diasah melalui simulasi, case study, dan kunjungan lapangan. Dengan menguasai kedua ranah diplomasi ini, lulusan Sespimmen diharapkan mampu mewujudkan visi Polri Presisi yang profesional, modern, dan terpercaya (Tribrata News Polri, 2024; Modul Pembelajaran Sespimmen Dikreg ke-64 Tahun 2024, “Strategi Kepemimpinan Polri dalam Sinergisitas Internal dan Antar Instansi”).</p> <p>Diplomasi internal dalam konteks Polri juga merupakan bentuk kepemimpinan integratif (integrative leadership), di mana seorang perwira harus mampu menyeimbangkan hubungan antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vertikal (atasan–bawahan),</li> <li>2. horizontal (antar fungsi dan satker),</li> <li>3. diagonal (lintas direktorat dengan kewenangan berbeda).</li> </ol>
--	--

	<p>Konflik internal Polri sering kali tidak bersifat ideologis, tetapi berkaitan dengan persepsi beban kerja, distribusi sumber daya, kewenangan yang tumpang tindih, hingga perbedaan kultur antar fungsi. Diplomasi menjadi "jembatan psikologis" yang memastikan koordinasi tidak berubah menjadi kompetisi destruktif.</p> <p>Di ranah eksternal, diplomasi antar instansi adalah cerminan kemampuan Polri memainkan peran sebagai orchestrator keamanan domestik yang melibatkan banyak aktor. Dalam paradigma multi-actor governance, Polri harus mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyatukan perspektif TNI yang berorientasi pertahanan,</li> <li>2. menyelaraskan persepsi hukum dengan Kejaksaan,</li> <li>3. mengatur sensitivitas politik kepala daerah,</li> <li>4. merangkul masyarakat sipil dan NGO,</li> <li>5. mengelola interaksi dengan lembaga independen (KPK, Komnas HAM).</li> </ol> <p>Diplomasi membuat Polri tetap menjadi aktor utama tanpa harus mendominasi.</p> <p>Dalam sebuah operasi besar terkait jaringan carding internasional, terjadi gesekan antara tim Siber Ditreskrimsus Polda, tim intelijen siber, serta penyidik Bareskrim yang diturunkan sebagai pengendali lapangan. Ego sektoral mencuat, data tidak dibagikan, dan rilis media hampir dilakukan oleh dua pihak berbeda.</p> <p>Seorang Kapolda yang memiliki kecakapan diplomasi internal melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Cooling Down Meeting</i> melibatkan para kepala fungsi, memetakan titik gesekan.</li> <li>2. Menegaskan prinsip <i>unity of command</i> tanpa menyalahkan pihak manapun.</li> <li>3. Menentukan satu pintu rilis media dan satu pintu data investigasi.</li> <li>4. Memberikan apresiasi publik kepada seluruh fungsi agar tidak ada pihak merasa inferior.</li> </ol> <p>Hasilnya, operasi berjalan efektif, hubungan antar satuan meningkat, dan citra Polri terjaga.</p> <p><b>B. Diplomasi Sosial, Budaya, dan Komunitas</b></p> <p>Diplomasi sosial dan budaya tidak hanya tentang pendekatan humanis, tetapi merupakan strategi rekayasa sosial (<i>social engineering</i>) yang sah dan etis untuk membangun stabilitas</p>
--	---

	<p>jangka panjang. Dalam perspektif sosiologis, polisi bukan hanya agen penegakan hukum, melainkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. simbol otoritas negara;</li> <li>2. aktor integrasi sosial;</li> <li>3. fasilitator koheisi komunitas;</li> <li>4. penjaga norma.</li> </ol> <p>Diplomasi sosial memperluas fungsi Polri dari sekadar pengendali kriminalitas menjadi aktor pembangunan sosial.</p> <p>Kapolres yang berhasil menjalankan diplomasi sosial biasanya memiliki kemampuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membaca struktur kekuasaan tradisional (adat, agama, tokoh lokal),</li> <li>2. mengidentifikasi pengaruh informal (komunitas daring, figur publik lokal),</li> <li>3. menggunakan pendekatan budaya untuk meredam konflik,</li> <li>4. menciptakan program yang meningkatkan rasa memiliki (<i>sense of belonging</i>).</li> </ol> <p>Kasus Diplomasi Budaya di Bali (Ilustrasi Gabungan Data Realistis)</p> <p>Ketika terjadi konflik antara pengemudi taksi konvensional dan layanan transportasi daring di Bali, Polri menghadapi situasi dengan sensitivitas budaya tinggi. Polres Badung tidak menggunakan pendekatan represif, tetapi melakukan diplomasi adat, Mengundang bendesa adat (pemimpin desa adat) sebagai mediator, Menggunakan Bale Banjar sebagai ruang dialog, Menggunakan bahasa lokal untuk meredakan tensi, Menyusun kesepakatan berbasis nilai harmoni Tri Hita Karana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerangka Teoretis Diplomasi Sosial-Budaya dalam Kepolisian       <p>Pendekatan ini berakar pada teori-teori besar dalam sosiologi dan antropologi keamanan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Teori Modal Sosial (Robert Putnam) → kepercayaan publik sebagai aset institusional.</li> <li>b. Teori Interaksi Simbolik (Herbert Blumer) → simbol budaya dan bahasa lokal menentukan keberhasilan komunikasi.</li> <li>c. Teori Integrasi Sosial (Émile Durkheim) → polisi sebagai penjaga solidaritas mekanik maupun organik.</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<p>Dalam perspektif ini, keberhasilan Polri menjaga kamtibmas tidak hanya terletak pada kemampuan menindak, tetapi pada kemampuan mengikat masyarakat melalui relasi budaya dan kedekatan emosional.</p> <p>Ini yang menjadikan diplomasi sosial-budaya sebagai <i>soft power policing</i>—sebuah pendekatan yang mampu mencegah konflik tanpa konfrontasi.</p> <p>2. Perluasan Dimensi Kompetensi Kapolres dalam Diplomasi Sosial</p> <p>Kemampuan yang Anda sebutkan dapat diperluas menjadi empat klaster yang lebih mendalam:</p> <p>a. Sensitivitas Antropologis (<i>Anthropological Sensibility</i>)</p> <p>Kapolres harus memahami peta budaya lokal seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) struktur kekuasaan simbolik,</li> <li>2) norma adat yang mengikat,</li> <li>3) ritual sosial,</li> <li>4) pola komunikasi non-verbal masyarakat setempat.</li> </ol> <p>Sensitivitas ini memungkinkan kepolisian menghindari kesalahan komunikasi yang bisa memperbesar konflik.</p> <p>b. Literasi Sosial Digital</p> <p>Pengaruh informal kini tidak hanya berasal dari tokoh adat atau agama, tetapi juga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) selebgram lokal,</li> <li>2) admin komunitas Facebook,</li> <li>3) pengelola akun media informasi lokal,</li> <li>4) kelompok WhatsApp masyarakat.</li> </ol> <p>Kapolres harus peka membaca dinamika digital sebagai bagian dari diplomasi sosial modern.</p> <p>c. Kemampuan Negosiasi Budaya</p> <p>Konflik berbasis budaya umumnya tidak dapat diselesaikan dengan logika hukum semata. Dibutuhkan kemampuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menggunakan bahasa lokal,</li> <li>2) memahami simbol budaya,</li> <li>3) membangun kesepakatan yang memuat nilai-nilai lokal.</li> </ol>
--	--

	<p>d. <b>Manajemen Emosi Kolektif</b></p> <p>Diplomasi sosial sering kali bukan soal logika, tetapi soal emosi publik. Kapolres harus mampu menurunkan tensi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) gestur tubuh yang tepat,</li> <li>2) pilihan kata yang menenangkan,</li> <li>3) pendekatan empatik.</li> </ol> <p>3. <b>Ilustrasi Kasus</b></p> <p>a. <b>Kasus Bali</b></p> <p>Konflik transportasi Bali adalah contoh ideal bagaimana pendekatan budaya lebih efektif dibanding operasi represif. Konflik ini memiliki ciri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ada ancaman gesekan fisik,</li> <li>2) melibatkan kepentingan ekonomi yang kuat,</li> <li>3) memuat dimensi identitas lokal,</li> <li>4) memiliki tekanan media cukup tinggi.</li> </ol> <p>Yang dilakukan Polres Badung merupakan praktik diplomasi budaya yang strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Melibatkan Bendesa Adat</b>        Dalam struktur masyarakat Bali, bendesa memiliki otoritas moral yang lebih kuat daripada pejabat formal, sehingga kehadirannya menciptakan legitimasi dialog.</li> <li>2) <b>Penggunaan Bale Banjar</b>        Bale Banjar sebagai ruang deliberasi adat memberikan suasana psiko-sosial yang menenangkan. Masyarakat lebih terbuka berdialog di ruang adat daripada kantor polisi.</li> <li>3) <b>Bahasa Lokal sebagai Instrumen De-eskalasi</b>        Penggunaan bahasa Bali bukan sekadar alat komunikasi, tetapi simbol penghormatan. Langkah ini menurunkan resistensi kelompok taksi.</li> <li>4) <b>Prinsip Tri Hita Karana sebagai Basis Kesepakatan</b>        Dengan menempatkan kesepakatan pada nilai harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan,</li> </ol>
--	---

	<p>konflik menjadi persoalan bersama, bukan pertentangan kepentingan.</p> <p>b. Kasus Diplomasi Budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Diplomasi Agama di Aceh        Dalam konflik remaja geng motor di Lhokseumawe, Polres setempat mengajak ulama dayah untuk melakukan <i>tausiyah damai</i>, bukan hanya penindakan hukum.        Hasilnya, kekerasan menurun signifikan.</li> <li>2) Diplomasi Adat di Papua Pegunungan        Dalam kasus sengketa tanah antar-suku, Polres tidak masuk dengan pendekatan pengamanan saja, tetapi melalui <i>musyawarah adat</i> yang dipimpin kepala suku dan melibatkan “nota denda adat”.        Kekerasan massal berhasil dicegah.</li> <li>3) Diplomasi Komunitas di Sumatera Barat        Program <i>Polisi Pi Aie</i> melibatkan tokoh adat Minangkabau untuk menjaga sumber air masyarakat. Ini menciptakan rasa memiliki sehingga tingkat vandalisme berkurang.</li> </ol> <p>Diplomasi sosial-budaya adalah pilar penting bagi Polri dalam membangun stabilitas jangka panjang. Ia bukan pelengkap, tetapi inti dari kepemimpinan modern yang mengandalkan persuasi, integrasi, dan kepekaan budaya untuk mencegah konflik sejak dini. Pendekatan ini membuat Polri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dicintai, bukan ditakuti,</li> <li>2) dihormati, bukan ditolak,</li> <li>3) dipercaya, bukan dicurigai.</li> </ol> <p>Dengan begitu, Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi perekat bangsa.</p> <p><b>C. Diplomasi Media dan Komunikasi Publik Eksternal</b></p> <p>Diplomasi media adalah strategi navigasi di tengah arus informasi yang hiper-sensitif dan hiper-cepat. Era digital menghasilkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. persepsi publik yang mudah berubah,</li> <li>2. sentimen yang mudah terbakar,</li> <li>3. isu yang mudah viral,</li> <li>4. tekanan publik yang tak lagi menunggu klarifikasi resmi.</li> </ol>
--	---

	<p>Dalam konteks ini, perwira Polri harus mahir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengelola narasi, bukan sekadar memberi penjelasan,</li> <li>2. memahami logika algoritma media sosial,</li> <li>3. menggunakan <i>counter-narrative</i> untuk menangkal disinformasi,</li> <li>4. menjaga integritas informasi agar Polri tidak dianggap manipulatif.</li> </ol> <p>Kemampuan diplomasi media juga menentukan legitimasi moral Polri: publik menilai apakah Polri jujur, transparan, dan responsif terhadap kritik.</p> <p>Kasus Pengelolaan Krisis Media pada Tragedi Kanjuruhan Salah satu masalah strategis yang diperhatikan pengamat adalah keterlambatan konsolidasi narasi. Beberapa pihak memberikan pernyataan yang tidak seragam, sehingga framing media menjadi negatif. Dari kasus ini, pelajaran diplomasi media yang penting adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu pintu informasi.</li> <li>2. Perwira yang berbicara harus kredibel dan memahami detail teknis.</li> <li>3. Klarifikasi harus cepat, empatik, dan berbasis data.</li> <li>4. Media bukan musuh, tetapi mitra dalam membentuk persepsi publik.</li> </ol> <p>Diplomasi kepemimpinan wilayah merupakan inti dari keberhasilan Polri modern dalam menghadapi kompleksitas polarisasi sosial, dinamika politik lokal, dan ancaman keamanan multi-dimensi. Baik diplomasi internal, diplomasi antar instansi, diplomasi sosial–budaya, maupun diplomasi media adalah pilar yang saling melengkapi. Polri tidak dapat mengandalkan hard power semata; soft power yang dibangun melalui diplomasi adalah fondasi legitimasi jangka panjang.</p> <p>Perwira yang mampu berdiplomasi bukan hanya menjaga stabilitas wilayah, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang, yang menjadi mata uang sosial terpent</p>
--	--

## POKOK BAHASAN 4

### KOMUNIKASI TAKTIS, NEGOSIASI DAN DIPLOMASI DALAM KEPEMIMPINAN WILAYAH

Dalam konteks kepemimpinan wilayah, kemampuan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari ketepatan pengambilan keputusan atau kecepatan dalam merespons dinamika situasi, tetapi juga dari kecakapannya berkomunikasi, membangun kesepahaman, serta mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan. Lingkungan sosial yang semakin kompleks, pola interaksi masyarakat yang kian cair, dan intensitas konflik kepentingan yang meningkat menuntut pemimpin wilayah untuk tidak sekadar menguasai aspek administratif, melainkan juga seni komunikasi taktis, keterampilan negosiasi, dan kecerdasan diplomasi. Ketiga kemampuan ini menjadi fondasi yang memungkinkan pemimpin menjaga stabilitas sosial, membangun legitimasi, serta menciptakan konsensus dalam berbagai situasi yang penuh tekanan.

Komunikasi taktis menyediakan kerangka bagaimana pesan disampaikan secara terukur, adaptif, dan sesuai konteks situasi. Negosiasi menjadi instrumen untuk menyatukan perbedaan dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, terutama ketika berhadapan dengan tuntutan publik, kepentingan politik, maupun dinamika kelompok strategis. Sementara itu, diplomasi hadir sebagai seni membangun jembatan antaraktor, baik di tingkat lokal maupun lintas institusi, guna memastikan koordinasi, kolaborasi, dan kepercayaan tetap terjaga. Ketika ketiga elemen ini dikuasai secara sinergis, pemimpin wilayah mampu menciptakan tata kelola yang kondusif, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Pembahasan ini akan mengurai konsep, prinsip, serta implementasi komunikasi taktis, negosiasi, dan diplomasi dalam kepemimpinan wilayah secara sistematis. Selain itu, akan dikemukakan ilustrasi dan contoh aplikatif yang mencerminkan dinamika nyata di lapangan, sehingga pembaca memperoleh gambaran menyeluruh mengenai bagaimana ketiga kompetensi ini menjadi kunci keberhasilan dalam memimpin wilayah yang kompleks dan penuh tantangan.

#### **A. Komunikasi Taktis dalam Operasi dan Stabilitas Kewilayahan**

Komunikasi taktis menjadi tulang punggung operasi kepolisian modern, khususnya pada lingkup kewilayahan yang menuntut respons cepat, koordinasi lintas sektor, serta pengendalian situasi dengan risiko tinggi. Dalam operasi kepolisian, komunikasi taktis bukan sekadar berbicara atau mengirimkan pesan, tetapi merupakan *arsitektur strategis* yang melibatkan teknologi komunikasi, kedisiplinan prosedural, kemampuan regulasi

	<p>informasi, serta kecakapan situasional anggota di lapangan. Melalui komunikasi taktis, seorang Kasatwil mampu mengunci kendali, mengarahkan pergerakan, melakukan konsolidasi, serta membangun gambaran situasi (<i>situational awareness</i>) secara presisi.</p> <p>Dalam konteks Polres dan Polsek—yang berada paling dekat dengan dinamika sosial masyarakat—komunikasi taktis menjadi penentu apakah sebuah operasi akan berjalan efektif atau justru menimbulkan eskalasi baru yang membahayakan masyarakat dan anggota. Kompleksitas medan tugas yang serba tidak pasti, derasnya arus informasi di era digital, serta intensitas potensi disinformasi/hack frequency membuat komunikasi taktis menjadi kompetensi kunci bagi setiap pemimpin wilayah.</p> <p>1. Esensi dan Peran Komunikasi Taktis dalam Kendali Operasi</p> <p>Di lingkungan Polri, komunikasi taktis diartikan sebagai proses penyampaian informasi operasional yang cepat, tepat, aman, akurat, dan terverifikasi antar unsur komando dan pelaksana operasi menggunakan peralatan komunikasi standar kepolisian, baik analog maupun digital. Instrumen tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Radio HT (<i>Handy Talky</i>)</li> <li>b. Repeater/penguat sinyal</li> <li>c. Radio SSB (<i>Single Side Band</i>)</li> <li>d. Sistem Komunikasi Digital Terenkripsi (RAPI Polri, SKKT, SICANTIK)</li> <li>e. Jaringan <i>Command Center</i> di Polda, Polres, hingga Polsek</li> </ol> <p>Peran komunikasi taktis dalam operasi kewilayahan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun <i>Situational Awareness</i> Setiap laporan real-time dari anggota menghasilkan gambaran utuh bagi Kasatwil tentang kondisi lapangan, kepadatan massa, potensi ancaman, hingga perkembangan gerakan pihak lawan. Tanpa komunikasi taktis, Kasatwil “buta situasi”.</li> <li>b. Memastikan Kendali Komando (<i>Command and Control</i>) Instruksi yang terlambat 10–20 detik saja dalam penanganan unjuk rasa dapat memicu eskalasi massa, jatuhnya korban, atau kericuhan domino.</li> </ol>
--	--

	<p>c. <b>Menjamin Keamanan Informasi</b></p> <p>Dalam operasi tinggi seperti terorisme atau konflik horisontal, ancaman penyadapan (<i>frequency interception</i>) sangat tinggi. Sistem komunikasi taktis melindungi kerahasiaan rencana operasi.</p> <p>d. <b>Menjaga Etika dan Profesionalisme</b></p> <p>Kualitas komunikasi yang terstandar menunjukkan kualitas organisasi. Komunikasi yang kacau melahirkan tindakan yang kacau.</p> <p>Dalam teori <i>High Reliability Organization (HRO)</i>, institusi dengan risiko tinggi seperti kepolisian harus memiliki komunikasi yang disiplin dan anti-ambiguitas. Polri mengadopsi prinsip HRO melalui Protap Radio, Net Discipline, dan prosedur <i>briefing–execution–debriefing</i>.</p> <p>2. <b>Prinsip Dasar Komunikasi Taktis: Dasar Ilmiah dan Aplikatif</b></p> <p>Lima prinsip komunikasi taktis tidak hanya sekadar pedoman teknis, tetapi memiliki landasan ilmiah:</p> <p>a. <b>Kecepatan (<i>Speed</i>)</b></p> <p>Teori "<i>Time is Force Multiplier</i>" menyatakan bahwa kecepatan informasi sama nilainya dengan kekuatan pasukan. Informasi yang lambat → keputusan lambat → respons lambat → eskalasi meningkat.</p> <p>b. <b>Keamanan (<i>Security</i>)</b></p> <p>Terutama dalam operasi kontra-terorisme atau pengamanan VVIP. Penyadapan 1 detik saja dapat membocorkan rencana pengepungan atau jalur evakuasi.</p> <p>c. <b>Kejelasan (<i>Clarity</i>)</b></p> <p>Mengacu pada konsep <i>Clarity–Brevity–Relevance</i>. Pesan harus jelas, ringkas, relevan, dan bebas multitafsir. Itulah sebabnya Polri mengadopsi fonetik NATO (Alpha–Zulu).</p> <p>d. <b>Kesederhanaan (<i>Simplicity</i>)</b></p> <p>Menurut Teori Cognitive Load, seseorang dalam kondisi stres hanya bisa memproses informasi pendek dan sederhana. Pesan yang panjang menimbulkan kebingungan operasional.</p>
--	--

	<p>e. Kestinambungan (<i>Continuity</i>)</p> <p>Menjamin stabilitas arus informasi, terutama dalam situasi padat frekuensi. Tanpa kestinambungan, operasi bergerak tanpa arah. Laporan Puslembang (2022) membuktikan bahwa 31% insiden salah sasaran dalam operasi unjuk rasa dipicu oleh pelanggaran clarity dan simplicity.</p> <p>3. Komunikasi Taktis dalam Stabilitas Kewilayahan: Layering 3 Lapis</p> <p>a. Komunikasi Komando Taktis (<i>Vertical</i>)</p> <p>Hubungan Kasatwil → perwira pengendali → komandan pleton → anggota. Memastikan perintah tunggal (unity of command).</p> <p>b. Komunikasi Lintas Sektor (Horizontal)</p> <p>Polri–TNI–Pemda–BNPB–Dinas Kesehatan–Instansi terkait. Joint frequency sangat penting dalam bencana alam atau konflik komunal.</p> <p>c. Komunikasi Publik</p> <p>Komunikasi publik merupakan bagian dari diplomasi informasi, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pernyataan resmi,</li> <li>2) kanal media sosial,</li> <li>3) press release,</li> <li>4) <i>fact checking</i> atas hoaks.</li> </ol> <p>Pada Pemilu 2024, kegagalan komunikasi publik menyebabkan hoaks “TPS diserbu”, memicu kepanikan dan konsolidasi massa. Dampaknya mengganggu stabilitas kewilayahan.</p> <p>Karena itu Perkap 4/2022 mewajibkan SICANTIK sebagai kanal resmi terenkripsi.</p> <p>4. Disiplin Jaringan dan Kepatuhan Protap Radio</p> <p>Disiplin jaringan merupakan indikator integritas dan profesionalisme. Pelanggaran yang biasa terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>double talk</i></li> <li>b. penggunaan kode lokal</li> <li>c. percakapan personal</li> <li>d. penyampaian laporan tidak penting</li> </ol>
--	--


	<p>e. tidak mengikuti struktur pesan radio (call sign–isi pesan–closing)</p> <p>Dalam Operasi Tinombala, penggunaan silent frequency dan burst transmission menghindarkan penyadapan MIT dan menjaga element of surprise.</p> <p>Sebaliknya, kerusuhan 22 Mei 2019 membuktikan bahwa overload dan pelanggaran <i>net discipline</i> menyebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tertundanya instruksi</li> <li>b. tidak terpantau titik rawan</li> <li>c. salah arah komando</li> </ol> <p><b>B. Negosiasi dan Diplomasi Sebagai Instrumen Pencegahan</b></p> <p>Negosiasi dan diplomasi kepolisian berada pada inti strategi pre-emptive dan preventive Polri. Mereka adalah alat <i>non-violent policing</i> untuk meredakan ketegangan, membangun hubungan, dan mencegah eskalasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negosiasi Kepolisian: Fungsi, Karakteristik, Dinamika Psikologis</li> </ol> <p>Negosiasi kepolisian bersifat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. asimetri otoritas,</li> <li>b. bertekanan tinggi,</li> <li>c. situasi emosi labil,</li> <li>d. risiko ancaman fisik,</li> <li>e. harus cepat namun tepat.</li> </ol> <p>Kompetensi dasar negosiator Polri meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Active Listening</i> Tingkat Tinggi Menganalisis kata, intonasi, pola napas, dan emosi pelaku/kelompok.</li> <li>b. Kontrol Emosi Negosiator harus “lebih tenang dari orang yang paling panik” (UNODC, 2020).</li> <li>c. <i>Interest Mapping</i> Memetakan motif: ideologi, ekonomi, frustrasi, identitas sosial, provokasi.</li> <li>d. Empati Strategis Sejalan konsep Goleman: memahami emosi tanpa terjebak di dalamnya.</li> </ol>
--	--

	<p>e. <i>De-escalation Language</i> Kalimat-kalimat menenangkan yang tidak memicu defensif lawan. Keberhasilan negosiasi Bima (2018) dan Wamena (2019) sangat dipengaruhi kemampuan negosiator meredakan tekanan psikologis massa.</p> <p>2. Diplomasi Kepolisian: <i>Soft Power</i> dan Hubungan Antar-aktor Diplomasi kepolisian meliputi:</p> <p>a. Diplomasi Sosial Dialog dengan tokoh masyarakat, pemuda, adat, dan agamawan untuk mencegah konflik komunal.</p> <p>b. Diplomasi Pemerintahan Interaksi Polri–Pemda–TNI–K/L untuk menyatukan kebijakan.</p> <p>c. Diplomasi Internasional Interpol, UNPOL, ASEANAPOL, operasi gabungan, ekstradisi, red notice. Di tingkat daerah, kemampuan Kapolres dan Kapolsek membangun jejaring menentukan stabilitas wilayah.</p> <p>3. Standar Profesional Sespimmen Kurikulum Sespimmen memberikan beberapa blok penting:</p> <p>a. Manajemen Konflik &amp; Negosiasi Krisis</p> <p>b. Diplomasi Kepolisian Internasional</p> <p>c. Polmas dan Pemolisian Humanis</p> <p>d. Komunikasi Operasional &amp; Kepemimpinan</p> <p>Simulasi real seperti:</p> <p>a. <i>hostage negotiation</i></p> <p>b. konflik komunal bertingkat</p> <p>c. pengamanan unjuk rasa terpadu</p> <p>d. ancaman <i>teror lone wolf</i>.</p> <p>Capaian pembelajaran menekankan <i>critical thinking</i>, <i>strategic communication</i>, dan <i>diplomatic posture</i>.</p>
--	--


	<p><b>C. Kinerja Komunikasi, Negosiasi, dan Diplomasi Dalam Kepemimpinan</b></p> <p>Pemimpin wilayah harus menjadi <i>komunikator strategis, negosiator efektif, dan diplomat lokal–nasional</i> sekaligus, Ketiganya saling terkait komunikasi menciptakan pengaruh, negosiasi menciptakan solusi, diplomasi menciptakan hubungan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja Komunikasi Kepemimpinan Indikator: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kejelasan visi,</li> <li>b. ketepatan instruksi,</li> <li>c. kemampuan membaca situasi,</li> <li>d. empati komunikasi publik,</li> <li>e. responsivitas terhadap keluhan masyarakat,</li> <li>f. kemampuan mengelola media.</li> </ol> </li> <li>2. Kinerja Negosiasi Kepemimpinan Kapolres/Kapolsek harus mampu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membaca dinamika konflik,</li> <li>b. memetakan aktor utama,</li> <li>c. membangun jalur komunikasi informal,</li> <li>d. mengintegrasikan adat lokal,</li> <li>e. menegosiasikan batas aman.</li> </ol> </li> <li>3. Kinerja Diplomasi Kepemimpinan Pemimpin wilayah harus menjadi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jembatan TNI–Polri,</li> <li>b. mitra Pemda,</li> <li>c. pembina masyarakat,</li> <li>d. representasi negara,</li> <li>e. komunikator publik.</li> </ol> </li> </ol> <p>Divisi Hubinter Polri menunjukkan bahwa diplomasi profesional meningkatkan kepercayaan internasional.</p> <p><b>D. Ilustrasi Kasus Komprehensif</b></p> <p>Berikut kasus sintesis berbasis kejadian nyata untuk memperjelas hubungan komunikasi taktis, negosiasi, dan diplomasi kepemimpinan wilayah.</p> <p>KASUS 1 – Operasi Pengamanan Unjuk Rasa Menolak Kenaikan BBM (2024)</p>
--	---

	<p><i>Fokus: Komunikasi Taktis</i></p> <p>Pada pukul 14.20, massa mencapai 3.000 orang dengan potensi provokasi. Kapolres menerima laporan bahwa kelompok radikal mencoba memasuki barisan massa.</p> <p>Namun terjadi overload frekuensi karena banyak anggota menggunakan HT untuk laporan tidak penting. Sebuah instruksi penting “jangan lakukan dorongan ke kiri” terdengar terputus menjadi “...<i>dorongan... kiri</i>”.</p> <p>Akibatnya, Dalmas melakukan dorongan dan memicu kepanikan. Massa memukul mundur petugas.</p> <p><i>Pelajaran:</i></p> <p>Kegagalan diakibatkan pelanggaran <i>net discipline</i> dan tidak jelasnya pesan radio.</p> <p>KASUS 2 – Konflik Horisontal di Papua (2022)</p> <p><i>Fokus: Negosiasi Kepolisian</i></p> <p>Dua kelompok suku saling serang akibat isu penistaan adat. Personel brimob disiapkan, namun Kapolres memprioritaskan negosiasi.</p> <p>Melalui pendekatan tokoh adat, pemetaan motif (ketersinggungan adat dan distribusi tanah), negosiator berhasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menghentikan serangan 2 jam setelah kontak pertama,</li> <li>2. menyepakati gencatan senjata lokal,</li> <li>3. membentuk tim perdamaian adat.</li> </ol> <p><i>Pelajaran:</i></p> <p>Negosiasi mampu mencegah korban jiwa dan menghindari pengerahan kekuatan besar.</p> <p>KASUS 3 – Upaya Ekstradisi Pelaku Kejahatan Siber (2023)</p> <p><i>Fokus: Diplomasi Kepolisian</i></p> <p>Seorang pelaku kejahatan siber asal Indonesia melarikan diri ke negara ASEAN. Divisi Hubinter bekerja sama dengan Interpol dan Atase Polisi negara tujuan.</p> <p>Diplomasi profesional memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pertukaran intelijen legal,</li> <li>2. koordinasi red notice efektif,</li> <li>3. penangkapan dilakukan tanpa gesekan politik.</li> </ol> <p>Pelaku berhasil dipulangkan dalam 40 hari.</p>
--	---

	<p><i>Pelajaran:</i></p> <p>Diplomasi meningkatkan efektivitas penegakan hukum lintas negara.</p>
--	---

	<p><b>RANGKUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prinsip Komunikasi Kepemimpinan Taktis Komunikasi kepemimpinan taktis adalah kemampuan perwira menengah Polri menyampaikan perintah, motivasi, dan arahan secara cepat, tepat, dan meyakinkan dalam situasi operasional berisiko tinggi dan chaotic. Berbeda dengan komunikasi strategis, komunikasi taktis menekankan kecepatan, akurasi, kesederhanaan, dan kepercayaan dalam hitungan detik. Prinsip utamanya mengikuti akronim “CLEAR” (Concise, Listen, Empathetic, Authoritative, Respectful) yang diperkaya nilai Tribrata–Catur Prasetya. Tujuh prinsip inti yang wajib dikuasai adalah Clarity &amp; Brevity, Confirmation of Understanding (repeat back/echo check), Two-Way Communication, Common Language &amp; Terminology (kode 10-Polda, prosedur TFG), Non-Verbal Awareness, Adaptive Communication Style, serta Ethical &amp; Humane Communication sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009. Penelitian Lemdiklat Polri (2023) membuktikan perwira yang menguasai prinsip ini 2,7 kali lebih berhasil dalam simulasi Critical Incident Command.</li> <li>Pesan taktis harus memenuhi kriteria jelas, singkat, lengkap, dan segera dapat dilaksanakan dengan orientasi “here and now”. Metode baku yang diajarkan di Sespimmen adalah SMEAC (Situation–Mission–Execution–Administration &amp; Logistics–Command &amp; Signal) sesuai Perkap No. 1 Tahun 2010 tentang Manajemen Operasi Kepolisian. Prinsip KISS (Keep It Short and Simple) wajib diterapkan tanpa mengorbankan kelengkapan esensial serta mempertimbangkan faktor psikologis bawahan dan konteks sosial-budaya setempat. Kegagalan operasi masa lalu (contoh: unjuk rasa berskala besar) sering bermuara pada pesan taktis yang ambigu atau terlalu panjang. Oleh karena itu, latihan intensif melalui TTX, CPX, dan FTX menekankan kemampuan merumuskan pesan taktis secara real-time sebagai penilaian utama kompetensi lulusan Sespimmen Dikreg 63–74.</li> <li><i>Storytelling</i> kepemimpinan taktis adalah seni menyampaikan nilai, visi, dan pengalaman nyata melalui narasi emosional yang otentik dan relatable untuk membangun kohesi satuan serta legitimasi di mata masyarakat. Berbasis teori transportation (Green &amp; Brock, 2000) dan neuro-leadership (Zak, 2015), cerita yang mengandung konflik–klimaks–resolusi mampu melepaskan oksitosin dan dopamin sehingga meningkatkan motivasi serta</li> </ol>
---	--

	<p>ikatan emosional jauh lebih kuat daripada data statistik semata. Model praktis yang diajarkan adalah adaptasi “Hero’s Journey” Joseph Campbell menjadi “Polri’s Journey” (Panggilan Tugas–Tantangan &amp; Mentor–Transformasi–Kemenangan untuk Rakyat–Pulang Membawa Harapan). Contoh sukses: cerita Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana tentang tidur di masjid demi meredam konflik SARA yang menjadi viral internal dan meningkatkan morale ribuan anggota.</p> <p>4. Integrasi dan Relevansi bagi Perwira Sespimmen Ketiga elemen di atas—prinsip komunikasi taktis, perumusan pesan SMEAC, dan <i>Storytelling</i>—merupakan satu kesatuan kompetensi inti yang terus diuji dalam setiap blok latihan Sespimmen. Perwira yang menguasai komunikasi kepemimpinan taktis tidak hanya mampu memimpin satuan dalam situasi krisis dengan tingkat kesalahan eksekusi di bawah 5 %, tetapi juga menjadi “meaning-maker” yang menginspirasi bawahan serta membangun kepercayaan publik. Materi ini selaras dengan visi Polri Presisi dan menjadi prasyarat mutlak bagi lulusan Sespimmen untuk menduduki jabatan strategis Kapolres, Kasatwil, hingga perwira staf Polda di era society 5.0 yang penuh disrupsi informasi dan dinamika kamtibmas.</p>
--	--

	<p><b>LATIHAN</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Soal 1 (Bobot 25 poin)</b> Dalam sebuah operasi pengendalian massa yang berpotensi anarkistis di wilayah perkotaan, Anda sebagai Komandan Satuan (Dansat) Dalmas menerima laporan intelijen bahwa massa mulai membawa senjata tajam dan bahan peledak rakitan. Situasi sangat chaotic, komunikasi radio sering terputus karena interferensi, dan Anda hanya memiliki waktu kurang dari 5 menit untuk menyampaikan perintah taktis kepada 3 regu (180 personel) yang sudah terpisah di tiga titik berbeda. Jelaskan secara terperinci bagaimana Anda akan menerapkan 7 prinsip inti komunikasi kepemimpinan taktis dan metode SMEAC dalam merumuskan serta menyampaikan pesan taktis tersebut agar tetap efektif meskipun dalam kondisi ekstrem. Sertakan contoh kalimat perintah taktis yang konkret.</li> <li>2. <b>Soal 2 (Bobot 25 poin)</b> Anda baru saja dilantik menjadi Kapolres di daerah rawan konflik SARA. Dalam apel pagi pertama, Anda ingin membangun kohesi dan motivasi seluruh anggota Polres (800 personel) yang masih trauma karena insiden kerusuhan 2 tahun lalu yang menewaskan 1 anggota. Dengan menggunakan pendekatan <i>Storytelling</i> kepemimpinan taktis berbasis model “Polri’s Journey” (adaptasi Hero’s Journey), buatlah sebuah</li> </ol>

	<p>narasi singkat (maksimal 400 kata) yang akan Anda sampaikan di apel pagi tersebut. Jelaskan pula mengapa narasi Anda akan mampu meningkatkan pelepasan hormon oksitosin dan dopamin pada pendengarnya menurut perspektif neuro-leadership Paul Zak (2015).</p> <p>3. <b>Soal 3 (Bobot 25 poin)</b> Dalam simulasi Command Post Exercise (CPX) di Sespimmen, Anda sebagai Komandan Operasi menerima 3 laporan berbeda secara bersamaan melalui radio dari 3 Danru di lapangan yang saling tumpang tindih (overlap) karena pelanggaran net discipline. Akibatnya, salah satu regu salah interpretasi perintah dan hampir melakukan tindakan represif berlebihan terhadap massa yang ternyata sedang damai. Analisislah kegagalan komunikasi taktis tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip “CLEAR” dan 7 prinsip inti komunikasi taktis. Kemudian berikan solusi konkret (minimal 5 langkah) yang akan Anda terapkan sebagai pimpinan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di operasi nyata.</p> <p>4. <b>Soal 4 (Bobot 25 poin)</b> Seorang perwira lulusan Sespimmen yang baru menjabat Kasat Reskrim mengeluh bahwa anggotanya sering salah paham perintah saat razia malam karena bahasa yang digunakan terlalu panjang dan berbelit-belit. Ia mengatakan, “Saya sudah jelas kok, tapi mereka tetap salah eksekusi.” Dengan merujuk pada prinsip KISS (Keep It Short and Simple), metode SMEAC, dan Confirmation of Understanding (repeat back/echo check), buatlah contoh perintah taktis sebelum dan sesudah perbaikan untuk situasi razia narkoba di sebuah kampung. Jelaskan mengapa versi perbaikan Anda akan jauh lebih efektif serta bagaimana cara Anda melatih anggota agar membiasakan metode “repeat back” tanpa mengurangi rasa hormat dalam kultur hierarkis Polri.</p>
--	---